

DISKUSI PANEL



MPH-PGI
AKADEMI LEIMENA
PARKINDO

CIPAYUNG, 20 AGUSTUS 2003

TANGGUNGJAWAB GEREJA DALAM POLITIK

(Makalah Latar Belakang)

oleh

FRANZ MAGNIS-SUSENO

Dalam tulisan ini saya utarakan beberapa pandangan yang mendasari sikap Gereja Katolik terhadap tanggungjawab politik. Tentu butir-butir ini perlu diterapkan pada situasi aktual.

1. TITIK TOLAK INJILI: KAISAR DAN ALLAH

Sering sekali ucapan Yesus sangat terkenal ini dipakai untuk membicarakan hubungan antara Gereja dan negara: "Berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah" [Mt. 22,21]. Apa yang mau dikatakan Yesus di sini?

Tidak jarang kata Yesus ini diartikan seakan-akan Yesus bicara tentang pemisahan antara negara dan agama. Padahal masalah agama sama sekali tidak disinggung di sini. Yang mau dikatakan Yesus adalah lain. *Pertama* Ia mengatakan: Berikan

kepada kaisar apa yang memang menjadi haknya. Di mana kaisar sama dengan negara. Yesus mengaku bahwa negara mempunyai hak-hak dan para pengikut Yesus harus memenuhi hak-hak negara itu. Kiranya hal itu dapat juga diperluas. Yesus mau mengatakan bahwa di dunia terdapat pelbagai pihak, misalnya orangtua, atasan di tempat kerja, guru dan pemerintah. Semua mempunyai wewenang masing-masing (yang tidak diuraikan lebih lanjut oleh Yesus) dan manusia, termasuk para pengikut Yesus, wajib taat pada wewenang mereka itu. Dalam nada yang sama Santo Paulus menegaskan bahwa "tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah" [Roma 13,1]. Begitu pula kita membaca dalam surat pertama Petrus bahwa kita hendaknya tunduk kepada semua lembaga manusia [1 Pe 2,13 dsl.]. Karena itu Gereja menolak ajaran beberapa fihak kristiani ekstrem bahwa orang Kristen, karena dibimbing oleh Roh Kudus, tidak perlu taat kepada lembaga-lembaga manusia. Orang Kristen wajib tunduk pada hukum dan wewenang negara.

Itu yang pertama. Tetapi wejangan Yesus baru kita mengerti betul apabila kita memperhatikan juga yang kedua: "Dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah!" Nah, Yesus tidak mengatakan bahwa di samping hak negara, Allah juga mempunyai satu dua hak. Melainkan agar kita hendaknya jangan lupa bahwa hak (orangtua dan atasan dan) negara

semua akhirnya hak Allah. Karena (orangtua, atasan dan) kaisar menerima wewenang mereka dari Allah. Segala kewajiban di dunia hanya wajib sejauh sesuai dengan kewajiban paling dasar yang ada pada manusia: taat pada Allah! Hal itu dirumuskan dengan paling jelas oleh Petrus dan para rasul lain pada waktu Mahkamah Agama Yahudi di Yerusalem mau melarang mereka untuk mengajar dalam nama Yesus: "Kita harus lebih taat kepada Allah dari pada kepada manusia" [Kis. 5, 29]. Maka kewajiban untuk taat kepada penguasa dunia apa pun bersyarat: Kita wajib taat pada kaisar, tetapi apabila kaisar memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan hak Allah kita harus menolak.

Taat pada hak Allah berarti apa? Adalah tugas Gereja untuk, dalam cahaya bimbingan Roh Kudus, membaca Injil dan menjelaskan kehendak Allah. Atau, secara singkat: Allah menghendaki agar kita melakukan apa yang adil dan benar.

Sekarang kita dapat merumuskan dengan lebih persis sikap umat Kristen terhadap negara. Umat Katolik selalu mengakui dan taat pada wewenang negara, umat Katolik bersikap positif dan setia pada pemerintahnya, dan bahkan apabila ia dirugikan, ditekan atau ditindas ia tidak memberontak. Akan tetapi apabila negara memerintahkan sesuatu yang bertentangan dengan keadilan dan kebenaran, umat Katolik harus menolak. Dan memilih dirugikan dan bahkan bersedia mati, demi keadilan dan kebenaran. Dalam ini kita berpegang

pada sabda Yesus: "Seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya Aku, mereka juga akan menganiaya kamu... Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian, karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun Aku" [Yo 15,19; 16,2]. Kesediaan untuk menjadi martir, untuk mati demi iman kita, termasuk panggilan kita sebagai orang Kristen.

3. PLURALITAS OPSI - KESATUAN PANDANGAN DASAR

Sesudah kita melihat sikap dasar kristiani terhadap kekuatan-kekuatan di dunia, mari kita sekarang melihat dengan lebih terinci wewenang dan batas wewenang Gereja dalam bidang pembangunan politik.

Saya bertolak dari kesadaran dasar bahwa Gereja tidak diutus hanya untuk mengupayakan keselamatannya sendiri. Melainkan kita diutus melanjutkan karya keselamatan Kristus di seluruh dunia. Kita diutus menjadi saksi Kristus dalam masyarakat. Kita dijadikan garam dalam masyarakat.

Oleh karena itu umat kristiani memang wajib berpartisipasi dalam semua dimensi kehidupan masyarakat, sesuai dengan kemampuan dan kesempatan yang ada. Termasuk kehidupan politik. Bukan untuk mengkristenkan kehidupan poli-

tik. Bagi Gereja Katolik Paus Johannes Paulus II menegaskan kembali sikap Gereja: tidak ada "model-model pembangunan Katolik", jadi tidak ada "negara khas Katolik", "ekonomi khas Katolik", "masyarakat khas Katolik".

Dalam ini harus dibedakan wewenang Gereja sendiri dan wewenang orang-orangnya. Gereja sendiri memaklumkan prinsip-prinsip kristiani ke dalam semua bidang kehidupan, termasuk bidang politik. Tetapi Gereja tidak ikut menentukan kebijakan politik praktis. Sedangkan dalam pandangan Katolik, politisi Katolik terlibat dalam politik praktis, dalam semangat Injil, tetapi bukan atas nama Gereja, melainkan atas dasar tanggungjawab dan suara hati mereka sebagai orang Katolik dan warga negara.

Jadi Gereja boleh mau menentukan sikap-sikap mana yang diambil para politisi Katolik. Konsili Vatikan II menulis dengan tegas:

"Masyarakat politik dan Gereja di bidangnya masing-masing tidak bergantung satu sama lain dan otonom. Akan tetapi keduanya, - meskipun berdasarkan alasan yang berbeda-beda, melayani panggilan pribadi dan sosial manusia yang sama."¹

¹ *Gaudium et Spes* (GS), Konstitusi Pastoral Konsili Vatika II tentang Gereja di dalam dunia dewasa ini, nr. 76

Dalam teks ini diakui bahwa tujuan usaha negara dan Gereja adalah sama, yaitu manusia, akan tetapi dalam menjalankan tugas mereka, negara dan Gereja saling otonom. Gereja tidak berhak untuk mengatakan kepada negara apa yang harus dilakukannya, dan negara tidak boleh mencampuri kehidupan Gereja.

Hal itu mempunyai implikasi bagi partisipasi orang Katolik dalam kehidupan bernegara. Di satu pihak, dalam berpolitik orang Katolik tidak berada di bawah wewenang pimpinan Gereja. Uskup dan Sri Paus pun tidak dapat memerintahkan kepadanya apa yang harus dilakukannya. Orang Katolik sendiri, berdasarkan suara hatinya sebagai orang Katolik, harus menentukan sikapnya. Akan tetapi di lain pihak suara hati politik Katolik harus dididik supaya sesuai dengan pandangan dasar politik Gereja. Dalam menentukan sikapnya, ia harus berorientasi pada prinsip-prinsip etika politik kristiani (yang akan saya sebutkan dibawah).

Maka di antara orang Katolik boleh saja ada perbedaan opsi dan pendapat politik. Kalau dulu kebanyakan mengikuti Partai Katolik, tetapi selalu juga ada yang memilih PNI atau Marhaen. Dan sekarang ada politisi Katolik dalam Golkar maupun di PDI dan ada juga yang di Forum Demokrasi dan di Petisi 50. Tak ada keseragaman opsi politik umat Katolik. Tetapi pluralitas opsi itu berlandaskan prinsip-prinsip etika yang berpedoman pada ajaran Gereja Katolik tadi. Orang-orang

Katolik bisa saja mempunyai pandangan politik berbeda, tetapi pandangan dasar harus sama. Dengan demikian pluralitas opsi pun demi untuk keselamatan dan kemajuan bangsa.

4. SEMANGAT INJILI DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA

Apa yang dimaksud dengan semangat Injili? Saya mengikuti Paus Johannes Paulus II. Menurut Beliau semangat injil terdiri atas tiga sikap dasar: *Semangat cintakasih*, hormat terhadap *martabat manusia* setiap orang sebagai anak tercinta Allah, dan *solidaritas dengan orang-orang miskin dan lemah*. Semangat injili dalam tiga arah pewujudan ini mengikat politisi Katolik. Maka politisi Katolik tidak memberikan ruang kepada kebencian dan balas dendam. Ia tidak pernah memperlak orang lain, ia menolak pembangunan yang dibayar dengan mengurbankan orang-orang kecil, penduduk lokal, wanita dll. Dan ia berada di pihak orang-orang miskin, ikut membela hak-hak mereka, ikut memperjuangkan kepentingan mereka, menuntut agar mereka diberi perhatian khusus. Tiga semangat itulah ciri pengikut Kristus dalam kehidupan sosial-politik semua bangsa di mana ada umat Kristiani.

Yang penting adalah bagaimana menterjemahkan semangat injil itu ke dalam bahasa politik. Orang Katolik ikut dalam kehidupan politik tidak berarti bahwa mereka selalu sependapat. Bisa saja orang Katolik menganut kebijakan politik yang berbeda. Tak ada monopoli kebijakan politik. Maka per-

bedaan pandangan politik dalam umat Katolik wajar-wajar saja.

Akan tetapi di mana tidak boleh ada perbedaan adalah semangat injili tadi. Dalam ajaran Gereja sekarang ini, semangat injili dikonkretkan dalam beberapa *prinsip-prinsip etika politik kristiani*. Maka perbedaan dalam kebijakan kongkret di antara orang Katolik harus tetap berdasarkan cita-cita dasar yang sama dan perjuangan mereka tetap atas landasan prinsip-prinsip itu. Hanya dengan mengikuti prinsip-prinsip etika Katolik seorang politisi Katolik pantas disebut politisi Katolik.

Manakah prinsip-prinsip itu? Tidak ada prinsip-prinsip sama sekali baku. Namun *tujuh* prinsip berikut sekarang jelas disepakati dalam Gereja Katolik sebagai paling dasar dalam segala perjuangan politik.

5. TUJUH PRINSIP ETIKA POLITIK INJILI

(1) Prinsip kebaikan hati. Sikap baik terhadap siapa pun, kawan maupun lawan, adalah tuntutan dasar Yesus dari para pengikutnya. Begitu pula tujuan segala pembangunan adalah agar keadilan, kebahagiaan, kebebasan dan perdamaian bersama bertambah. Dalam kehidupan politik pun orang Katolik akan menunjukkan kesediaan untuk memaafkan, berdamai, untuk menghormati lawan.

(2) Berpihak pada kehidupan. Orang Katolik tidak memakai kematian sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuannya. Karena itu orang Katolik menolak abortus dan pembunuhan janin demi tujuan penelitian.

(3) Prinsip paling umum ajaran sosial Gereja adalah prinsip kesejahteraan. Yang dimaksud adalah: Negarawan dan politisi, baik di level nasional maupun lokal, ditugasi untuk mengusahakan kepentingan umum dan bukan kepentingannya sendiri. Negara pun bukan tujuan pada dirinya sendiri, melainkan diciptakan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Negara bagi manusia, bukan manusia bagi negara. Maka politisi Katolik selalu akan mendahulukan kepentingan umum terhadap kepentingan pribadi, juga terhadap kepentingan golongannya atau kepentingan partainya. Dalam prinsip itu langsung terimplikasi bahwa politisi Katolik tidak ikut korupsi. Politisi Katolik berpolitik demi kesejahteraan masyarakat dan tidak memakai kesempatan yang barangkali ada untuk secara tidak sah memperkaya diri.

(4) Prinsip subsidiaritas. Prinsip ini mengatakan bahwa lembaga lebih tinggi wajib membantu lembaga-lembaga lebih rendah apabila mereka tidak dapat sendiri menyelesaikan keperluan-keperluan mereka. Dan, dari sudut terbalik, tugas-tugas yang dapat diselesaikan secara memuaskan oleh lembaga-lembaga lebih rendah, tidak boleh diambil alih oleh lembaga lebih tinggi. Prinsip itulah yang menjadi latar belakang "oto-

nomi daerah". Apa yang dapat dikerjakan oleh propinsi, jangan ditarik ke pusat oleh pemerintah nasional. Dan apa yang dapat diselesaikan di tingkat kelurahan, bukan urusan bupati.

(5) Prinsip solidaritas. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam pembangunan semua harus sama beruntung dan sama berkorban, senasib-sepenanggungan. Solidaritas berarti bahwa yang lemah, miskin, tak berdaya harus didahulukan (*preferential option for the poor*). Solidaritas bangsa kelihatan dalam bagaimana bangsa itu memperlakukan anggota-anggotanya yang "kurang berarti". Prinsip solidaritas juga memuat tuntutan bahwa pewujudan keadilan sosial menjadi tujuan pertama pembangunan. Dewasa ini solidaritas harus menjangkau juga generasi-generasi yang akan datang. Oleh karena itu manusia wajib menjaga *keutuhan lingkungan hidup* agar generasi-generasi mendatang menemukan bumi yang masih pantas dihuni.

(6) Menjunjung tinggi martabat manusia yang diciptakan menurut citra Allah dan dipanggil menjadi anakNya yang tercinta menjadi nyata dalam prinsip hormat terhadap hak-hak asasi manusia. Gereja Katolik secara resmi mengakui hak-hak asasi manusia sebagai terjemahan sikap yang mau menghormati martabat manusia ke dalam kenyataan kehidupan sosial-politik. Maka politisi, dan tentu segenap warga Katolik, membela hak-hak dasar manusia. Begitu pula umat Katolik mendukung hak dan kewajiban masyarakat untuk ikut menentukan nasib

bangsa, atau, dengan kata lain, pewujudan kehidupan yang demokratis (Terutama hak-hak asasi manusia ini tidak pernah boleh kita langgar dan tidak pernah boleh kita biarkan pelanggaran-pelanggarannya terjadi. Di situ termasuk: Larangan terhadap pembunuhan sewenang-wenang, terhadap penggunaan sistemik penyiksaan [torture], baik fisik maupun psikis, terhadap hukuman kejam dan bengis, terhadap segenap pengekangan kebebasan beragama dan berkepercayaan menurut iman atau keyakinannya, terhadap penangkapan sewenang-wenang, perbudakan, perdagangan orang [wanita, anak di bawah umur]; terhadap kekejaman rutin oleh pihak keamanan seperti pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, penghancuran basis penghidupan para penduduk dalam wilayah yang ada masalah keamanan; terhadap penindasan berbentuk genosid, pemerkosaan hak minoritas-minoritas etnik, agama, atau budaya atas budaya, bahasa, agama dan atas otonomi terbatas berdasarkan adat-istiadat)

(7) Prinsip penolakan kekerasan. Dalam mengusahakan sasaran-sasaran, termasuk yang baik, kita tidak memakai kekerasan. Masalah-masalah dan konflik-konflik yang muncul wajib dipecahkan secara *damai*. Pemakaian ancaman, pemerasan dan paksaan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan harus ditolak.

6. GEREJA, IDEOLOGI NEGARA, DAN PANCASILA

Kelihatanlah bahwa etika politik injili bersifat inklusif. Para warga sebangsa yang bukan Katolik tidak perlu mengalami kesulitan dengannya. Etika politik injili sedikit pun tidak mengancam identitas religius golongan-golongan beragama lain. Ia tidak bersifat eksklusif. Etika politik injili dikembangkan dalam cahaya ajaran Yesus Kristus tentang cintakasih, akan tetapi dikembangkan dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Apabila patokan-patokan etika politik tadi terlaksana, segenap manusia dapat hidup dengan bebas dan sesuai dengan agama, kepercayaan, keyakinan-keyakinan, nilai-nilai dan cita-citanya sendiri. Itulah sebabnya etika politik Gereja Katolik bukan sebuah ideologi.

Akan tetapi etika politik injili jelas merupakan kriteria untuk menilai ideologi-ideologi lain. Orang Katolik hanya dapat menerima sebuah ajaran politik apabila semua tujuh prinsip etika politik injili tidak disangkal olehnya. Karena itu, tidak semua ideologi negara dapat diterima. Dapat dikatakan bahwa sebuah ideologi negara sekurang-kurangnya harus menjamin tiga hal berikut:

- (1) Bahwa martabat segenap anggota masyarakat sebagai manusia, dan itu berarti: hormat terhadap hak-hak asasi manusia, terjamin;
- (2) Bahwa segala bentuk ketidak-adilan sosial sungguh-sungguh mau ditiadakan;

- (3) Bahwa kebebasan beragama bukan hanya umat Katolik, melainkan segenap umat beragama dan berkepercayaan dijamin sepenuhnya.**

Oleh karena itu ideologi-ideologi seperti rasisme dan apartheid, kolektivisme, pendewaan negara, militarisme, chauvinisme, fasisme dan komunisme tidak dapat kita terima.

Di lain pihak, justru karena umat kristiani tidak mempunyai ideologi negara tersendiri, ia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat mendasarkan diri pada filsafat atau etika politik resmi (pada "ideologi negara" dalam arti "ideologi terbuka") yang dianut oleh bangsa dan negara masing-masing. Asal saja tiga tuntutan minimum tadi tidak tertutup. Maka umat kristiani tidak memerlukan landasan bernegara lain daripada yang menjadi landasan seluruh bangsanya. Karena itu, Gereja Katolik di Indonesia sejak 1945 mendasarkan diri pada Pancasila dalam keikutsertaan dalam kehidupan bangsa. Prinsip-prinsip Pancasila seluruhnya sesuai dengan martabat manusia dan tuntutan keadilan sosial serta justru dirumuskan untuk menjamin kebebasan beragama.

Melalui Pancasila bangsa Indonesia telah menyatakan tekadnya bahwa di dalam tubuhnya tidak ada golongan kelas satu dan kelas dua, tidak ada mayoritas atau minoritas, bahwa semua dapat hidup menurut identitas dan cita-cita luhur masing-masing. Pancasila menetapkan bahwa golongan kecil sa-

DISKUSI PANEL

ma saja dijamin haknya untuk beribadat dan hidup menurut agama dan kepercayaannya dengan golongan besar. Dengan demikian terjamin bahwa segenap anggota masyarakat, segenap kelompok dan golongan etnis, budaya dan agama, dapat merasa di rumahnya sendiri dalam persatuannya dalam negara Indonesia.■

